

## FAKTOR INFLASI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

13

Dewi Wuryandani

### Abstrak

*Resesi global yang terjadi saat ini dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kini dunia sedang menghadapi krisis. Bila hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama maka akan terjadi inflasi. Inflasi menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, Tulisan ini bertujuan menganalisis penyebab inflasi beserta sasaran dan upaya pengendaliannya. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan adanya lonjakan harga dan tarif pada barang atau jasa yang memiliki korelasi erat dengan energi. Dalam hal ini Komisi VII dan XI DPR RI perlu melakukan pengawasan secara berkala terhadap distribusi dan harga pasar atau mengendalikan inflasi riil di masyarakat. Upaya lainnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, pemerintah perlu mendorong optimalisasi pendapatan negara, juga mengatur strategi fiskal yang lebih ketat pada 2023, tetapi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.*

### Pendahuluan

Beberapa negara Asia pada tahun 1998 mampu bertahan dari krisis keuangan. Tetapi Indonesia terkena krisis, karena tidak dapat menahan besarnya dampak *cost push inflation*. Daya beli konsumen menurun akibat tingginya harga barang dan kebutuhan pokok, sedangkan nilai rupiah turun drastis. Krisis keuangan berawal yang dari Thailand tersebut membuat inflasi melonjak hingga 77% dan ekonomi tumbuh negatif lebih dari 13,7% (Bisnis Indonesia, 1 November 2022).

Konsekuensinya, gejala ekonomi dan politik tak terbendung dan meledak di tengah huru-hara massa. Demikian pula pada tahun 2008, Amerika Serikat mengalami krisis keuangan *subprime mortgage* akibat adanya liberalisasi pasar keuangan yang berdampak negatif pada perekonomian negara-negara di Eropa (Antarane.com, 23 Oktober 2020).

Saat ini negara-negara di dunia berada di ambang resesi, yang situasinya jauh lebih sulit daripada krisis finansial 2008 (Bisnis



Indonesia, 1 November 2022). Pelemahan ekonomi di negara-negara maju sudah terlihat nyata sejak memasuki Semester II/2022. Eropa bahkan mulai dilanda krisis energi dan pangan. Ancaman kelaparan diprediksi terjadi tahun 2023 akibat krisis pasokan gandum ke Afrika dan Timur Tengah ([international.sindonews.com](http://international.sindonews.com), 12 Oktober 2022). Penyebab terjadinya krisis tidak hanya faktor ekonomi tetapi sebagian besar akibat situasi geopolitik global, perang Rusia-Ukraina, hingga ancaman terjadinya perang nuklir.

Ancaman resesi ekonomi global tersebut bisa memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun-tahun berikutnya. Saat ini pertumbuhan momentumnya masih menguat, namun pemerintah diharapkan tetap waspada agar kenaikan inflasi yang terjadi tidak melahirkan kebijakan moneter baru dan menjaga laju ekonomi tetap kuat. Menurut IMF, pada kuartal terakhir tahun 2022 Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan ekonomi hingga 5,3%. Namun, memangkas prakiraan pertumbuhan Indonesia tahun 2023 dari 5,2% menjadi 5% ([Media Indonesia](http://Media Indonesia), 2 November 2022).

Inflasi menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, berdampak kepada permintaan kredit hingga investasi. Konsumsi domestik menjadi andalan dari pertumbuhan ekonomi. Selama inflasi tidak terlalu menguras konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi masih berpotensi mencatatkan kinerja yang baik ([Bisnis Indonesia](http://Bisnis Indonesia), 1 November 2022). Tulisan ini akan menganalisis penyebab inflasi beserta sasaran dan upaya pengendaliannya.

## Penyebab Inflasi

Berbagai upaya dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, karena adanya ketidakpastian ekonomi global dan kembali meningkatnya inflasi di dalam negeri. Menurut Badan Pusat Statistik, pada bulan Oktober 2022 terjadi inflasi 5,71% dibandingkan tahun lalu ([Ekonomi bisnis.com](http://Ekonomi bisnis.com), 1 November 2022). Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara *year-on-year* adalah bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, tarif angkutan antarkota, tarif kendaraan *online*, dan bahan bakar rumah tangga ([investor.id](http://investor.id), 1 November 2022).

Inflasi yang terjadi dikarenakan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September 2022. Saat itu, harga Pertalite naik 30,72%, solar naik 32,04%, dan Pertamina meningkat 16% ([Tempo.co](http://Tempo.co), 4 September 2022). Kemudian, pada 1 Oktober 2022, harga Pertamina diputuskan turun sebesar 4,14% ([Kompas.com](http://Kompas.com), 1 Oktober 2022). BPS mencatat dampak dari kenaikan harga BBM terhadap inflasi lazim terjadi pada bulan kedua sejak kebijakan itu diberlakukan.

Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rachman, mengatakan kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada *first round effect* terhadap harga BBM dan tarif jasa transportasi, tetapi juga *second round effect*, yakni pada barang dan jasa lainnya. Direktur Eksekutif *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan kenaikan harga BBM memiliki efek rambatan terhadap inflasi ([Republika.co.id](http://Republika.co.id), 4 Oktober 2022). Kebijakan itu menaikkan komponen inflasi harga diatur pemerintah (*administered price*) dan kemudian menjalar ke komponen inflasi *volatile food*.

Bank Indonesia (BI) selaku otoritas yang ditugaskan mengendalikan inflasi akan menaikkan suku bunga acuan apabila laju Indeks Harga Konsumen (IHK) global meningkat. Menurut Deputy Gubernur BI, Dody Budi Waluyo, penggunaan instrumen moneter akan terus digencarkan kendati harus mengorbankan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 (Bisnis Indonesia, 2 November 2022). Perekonomian menjadi tidak sehat bila tingkat inflasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Mengacu pada survei yang dilakukan oleh BI, tingkat inflasi pada Oktober 2022 mencapai 5,8% (*year-on-year*), sementara konsensus ekonom Bloomberg berada pada level 6,04% (*year-on-year*). Adapun, pada September 2022 inflasi terpantau 5,95% (*year-on-year*). Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini sebesar 5,2%, dan estimasi BI berada pada rentang 4,5%-5,3%. Perihal prospek ekonomi, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan pada Kuartal III/2022 mencapai 5,7%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kuartal II/2022 sebesar 5,4%. Akan tetapi, otoritas fiskal mewaspadaikan adanya perlambatan laju ekonomi pada kuartal terakhir, yang berisiko memengaruhi gerak ekonomi sepanjang 2022 (Bisnis Indonesia, 2 November 2022).

IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% atau tidak berubah dari proyeksi sebelumnya. IMF tidak menjelaskan secara spesifik alasan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, menjelaskan faktor penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia

datang dari pemulihan daya beli masyarakat hingga kinerja investasi. Tidak hanya itu, kebijakan ekonomi makro Indonesia dinilai sangat kuat dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak bergantung pada permintaan ekspor (Kumparan.com, 6 November 2022).

Pada bulan Oktober 2022 terjadi inflasi sebesar 5,71% (*year-on-year*) lebih rendah daripada bulan September yang mencapai 5,95% (*year-on-year*). Secara bulanan, indeks harga konsumen (IHK) tercatat deflasi 0,11% (*month-to-month/MtM*). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hal tersebut dipicu oleh penurunan harga Pertamina sebesar 4,14% pada 1 Oktober 2022, pengendalian pasokan, subsidi transportasi, dan operasi pasar. Inflasi inti pada bulan Oktober 2022 mencapai angka tertinggi sepanjang tahun 2022, yakni 3,31% (*year-on-year*) (Bisnis.com, 1 November 2022).

### **Sasaran Inflasi dan Upaya Pengendaliannya**

Kenaikan inflasi inti memang menandakan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Beberapa pemicunya adalah sudah tidak ketatnya mobilitas masyarakat dan efek pandemi Covid-19 yang perlahan mulai berkurang. Namun, dampak inflasi inti cenderung terjadi dalam jangka panjang. Apabila inflasi inti bergerak tak terkendali, maka berisiko kembali mendorong pengetatan kebijakan moneter salah satunya melalui kenaikan suku bunga acuan. Penyebabnya adalah inflasi ini menjadi satu-satunya komponen indeks harga konsumen (IHK) yang dijadikan dasar oleh BI untuk menentukan tingkat suku bunga acuan.

Kenaikan harga BBM tidak hanya menyebabkan adanya lonjakan harga dan tarif pada barang atau jasa yang memiliki korelasi erat dengan energi. Kebijakan itu pun memicu berputarnya efek lanjutan yang turut andil mendorong inflasi inti bulan lalu. Efek kenaikan BBM terhadap inflasi masih terasa pada Oktober 2022. Hal itu terefleksi pada tingginya tingkat inflasi harga yang diatur pemerintah sehingga berdampak pada komponen IHK lainnya.

Inflasi inti terdorong oleh pemulihan sisi permintaan karena mobilitas saat pandemi mereda mulai mendorong masyarakat untuk berbelanja. Akan tetapi di sisi yang lain, ada faktor kenaikan beban biaya produksi dalam jangka panjang yang mulai diteruskan produsen ke konsumen ritel. Inflasi inti memotret indikator jangka panjang di luar bahan makanan bergejolak dan harga energi, sehingga menurutnya perlu diwaspadai efek pergerakannya ke tren kenaikan bunga acuan yang lebih agresif. BI memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga acuan pada kisaran 5,25%-5,5% hingga akhir tahun ini. Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rachman, menghitung suku bunga acuan bisa mencapai 5,75% pada akhir tahun ini mengingat potensi lonjakan inflasi masih tinggi (Bisnis Indonesia, 2 November 2022).

Adanya risiko tekanan inflasi setidaknya diperkirakan akan berlanjut hingga Semester I/2023 akibat penyesuaian harga BBM, mengingat efeknya juga cukup besar pada efek putaran kedua akibat mahalnya ongkos distribusi. DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati target inflasi selama tahun 2023 mendatang sebesar

3,6% dari semula 3,3%. Terkait hal ini, pemerintah perlu meningkatkan atau memperluas subsidi meskipun bisa membebani APBN. Tetapi ini sifatnya tidak *sustainable* dan akan membebani APBN dalam jangka pendek-menengah dan belum tentu juga memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi produktif. Menjadi dilema bagi pemerintah, di satu sisi pemerintah terus berupaya menjaga inflasi dengan menahan kenaikan harga kebutuhan pokok sampai akhir Desember 2022, namun di sisi lain sebaiknya pemerintah harus mengurangi beban subsidi energi pada tahun 2023 mendatang.

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan pemerintah. Penetapan sasaran inflasi yang dilakukan pemerintah tersebut berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024. Sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk periode 2022 - 2024, masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5%, dengan deviasi masing-masing  $\pm 1\%$  (Bi.go.id, 31 Oktober 2022).

Sasaran inflasi yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan, sehingga tingkat inflasi dapat dijaga pada tingkat yang rendah dan stabil. Salah satu upaya pengendalian inflasi menjadi inflasi yang rendah dan stabil yaitu dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Untuk mencegah terjadinya inflasi yang “berlebihan”, maka perlu mendorong daya beli masyarakat.

Daya beli dapat dipertahankan melalui subsidi kredit usaha seperti KUR, pemberian subsidi tepat sasaran, menciptakan lapangan kerja padat karya, dan kebijakan lainnya.

### Penutup

Inflasi menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Berbagai upaya dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya menekan laju inflasi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2023 mendatang, perlambatan inflasi belum tentu berlanjut. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS, kenaikan biaya transportasi pascakenaikan harga BBM, dan impor bahan baku dapat kembali mendorong naiknya inflasi.

Untuk mencegah terjadinya inflasi yang “berlebihan”, daya beli masyarakat perlu didorong. Daya beli dapat dipertahankan melalui subsidi kredit usaha seperti KUR, pemberian subsidi tepat sasaran, menciptakan lapangan kerja padat karya, dan kebijakan lainnya. Dalam hal ini Komisi VII dan XI DPR RI perlu melakukan pengawasan secara berkala terhadap distribusi barang kebutuhan pokok guna menjaga stabilisasi harga di masyarakat. Upaya lainnya adalah menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, dengan mendorong optimalisasi pendapatan negara, serta menerapkan strategi fiskal yang lebih ketat pada 2023, tetapi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha di dalam negeri.

### Referensi

- “Alarm Suku Bunga Tinggi”, *Bisnis Indonesia*, 2 November 2022, hal 1.
- “Alert! Inflasi Januari-Oktober 2022 Sudah Lewati Target BI”, *Bisnis.com*, 1 November 2022,

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/9/1593620/alert-inflasi-januari-oktober-2022-sudah-lewati-target-bi>, diakses 2 November 2022.

“BPS: Inflasi Tahunan Capai 5,71% pada Oktober 2022”, 1 November 2022, <https://investor.id/business/311575/bps-inflasi-tahunan-capai-571-pada-oktober-2022>, diakses 2 November 2022.

“Berawal dari Amerika Serikat, krisis keuangan menyebar ke Eropa, Asia”, 23 Oktober 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1801289/berawal-dari-amerika-serikat-krisis-keuangan-menyebar-ke-eropa-asia>, diakses 2 November 2022.

“Ekonom: BI Punya Ruang Naikkan Suku Bunga Hingga Level 5 Persen”, 4 Oktober 2022, <https://www.republika.co.id/berita/rj6icv383/ekonom-bi-punya-ruang-naikkan-suku-bunga-hingga-level-5-persen>, diakses 2 November 2022.

“Harga Pertamina Turun, Jadi Rp 13.900 Per Liter mulai Oktober 2022”, *Kompas.com*, 1 Oktober 2022, <https://otomotif.kompas.com/read/2022/10/01/082404415/harga-pertamax-turun-jadi-rp-13900-per-liter-mulai-oktober-2022>, diakses 2 November 2022.

“Hore! BPS: Inflasi Oktober 2022 Turun jadi 5,71 Persen”, *Bisnis.com*, 1 November 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/9/1593597/hore-bps-inflasi-oktober-2022-turun-jadi-571-persen>, diakses 2 November 2022.

“Inilah Rincian Kenaikan Harga BBM Pertamina 5 Tahun Terakhir”,

- Tempo.co, 4 September 2022, <https://bisnis.tempco.co/read/1630292/inilah-rincian-kenaikan-harga-bbm-pertamina-5-tahun-terakhir>, diakses 2 November 2022.
- “Inflasi”, 30 Oktober 2022, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx#Penetapan-Target>, diakses 7 November 2022.
- “Kuartal Krusial Ekonomi RI”, *Bisnis Indonesia*, 1 November 2022, hal. 1.
- “PBB: Krisis Global Sebabkan Kelaparan di Seluruh Afrika”, *SINDOnews.com*, 12 Oktober 2022, <https://international.sindonews.com/read/910523/44/pbb-krisis-global-sebabkan-kelaparan-di-seluruh-afrika-1665558623>, diakses 2 November 2022.
- “Perlambatan Ekonomi Tiongkok Berimbas kepada Asia”, *Media Indonesia*, 2 November 2022, hal. 11.
- “Proyeksi Ekonomi RI Kuartal III 2022, Masih Aman dari Ancaman Resesi?”, *Kumparan.com*, 6 November 2022, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/proyeksi-ekonomi-ri-kuartal-iii-2022-masih-aman-dari-ancaman-resesi-1zC4zauYa5i/full>, diakses 6 November 2022.
- “Saatnya Menyimpan Optimisme”, *Bisnis Indonesia*, 1 November 2022, hal 2



Dewi Wuryandani  
[dewi.wuryandani@dpr.go.id](mailto:dewi.wuryandani@dpr.go.id)

Dewi Wuryandani, menyelesaikan studi S1 pada jurusan Teknik Kimia - Fakultas Teknologi Industri di Universitas UPN “Veteran” Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Keuangan Manajemen Ekonomi-Magister Ekonomi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya dengan bidang kepakaran Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI Penulis pernah ditugaskan dalam Asistensi pembahasan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Perdagangan, RUU tentang Paten, RUU tentang Kewirausahaan dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun beberapa karya tulis telah diterbitkan diantaranya “Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Pasar Modal” (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Melalui Perdagangan Internasional (2015), Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2016), Teknologi Disruptif: Tantangan dan Peluang dalam Mendorong Kewirausahaan (2018), Pengembangan kewirausahaan untuk pemberdayaan UKM daerah (2019). Pariwisata Halal: Potensi dan prospek (2020). Inovasi Startup Pertanian: Modernisasi Agribisnis Pangan (2021).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.